

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Akta Notaris Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dan Problematika Hukumnya Di Pengadilan Cilacap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2546/Pdt.G/2014/PA.Clp)". Pada saat mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta bersama atau setelah ikrar talak diucapkan. Dengan ini penulis membahas mengenai permasalahan: Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor : 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. Bagaimana keterkaitan antara akta notaris dengan putusan hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian, serta bagaimana mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cilacap. Tujuan tesis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan Nomor : 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. Untuk menganalisis keterkaitan antara akta notaries dengan putusan hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah memutus pembagian harta bersama akibat perceraian. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Cilacap. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder didukung data primer, Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan pihak terkait. Data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pada Perkara Nomor 2546/ Pdt.G /2014 PA.Clp. adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, yaitu menurut ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka dengan pembagian masing-masing mendapat setengah dari harta bersama, pada prinsipnya semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan sebagai harta bersama, kecuali dibuktikan sebaliknya sebagai harta pribadi atau bawaan. 2. Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama, dengan demikian hanya kepada Hakimlah amanat undang-undang diserahkan untuk mencari dan menemukan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam hukum yang objektif sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman. Sedangkan Akta pembagian harta bersama yang dibuat oleh seorang notaris yang terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik, ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap, artinya bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya. 3. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah menurut penulis memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi sebagai berikut, yaitu: a. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut; b. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya. c. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, maka diajukan penjualan lelang ke KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atas ijin Pengadilan).

Kata kunci: Akta Notaris, Harta bersama, Akibat perceraian

ABSTRACT

The study, entitled "Execution of Deed of Distribution of Wealth Together On Divorce And Problems As a result of court rulings in Cilacap (A Case Study of Cilacap Religion Court Decision No. 2546 / Pdt.G / 2014 / PA.Clp)". At the time of applying for a divorce, the parties may apply for the decision of the division of joint property or after the pledge talaq pronounced. By this author discusses about the problem: What is the basic consideration of the judge in the case deciding the division of joint property due to divorce in the decision No. 2546 / Pdt.G / 2014 PA.Clp. How is the relationship between the notarial deed with the decision of Cilacap Religion Court judge who has to decide the division of joint property due to divorce, as well as how to overcome barriers to the implementation of the division of joint property in Cilacap Religion Court. Interest thesis to know the basic consideration of the judge in the case deciding the division of joint property due to divorce in the decision No. 2546 / Pdt.G / 2014 PA.Clp. To analyze the relationship between the notary deed with the decision of Cilacap Religion Court judge who has to decide the division of joint property due perceraian.Untuk analyze barriers to implementation of the division of joint property in Cilacap Religion Court. Writing using normative juridical method using secondary data supported the primary data, secondary data collection techniques done by the study of literature, primary data was done with free guided interviews with relevant parties. The data is processed and analyzed using qualitative analysis methods. Result: 1.Dasar consideration of the judge in granting judgment in Case No. 2546 / Pdt.G / 2014 PA.Clp. is based on Law No. 1 of 1974 Article 37 and the Compilation of Islamic Law Article 97, which according to the legal provisions applicable to them by sharing each gets half of the joint property, in principle, all property acquired throughout the marriage as community property, unless proven otherwise as personal property or congenital. 2. Proof of community property is something else that is quite complicated in the process of division of property together, so just to Hakimlah mandated by law be submitted to search and find the legal awareness in the society's objective set forth in the law, as foreseen in the Law Basic law of Judicial Power. While the Deed of division of joint property made by a notary is foremost in the power problem proving an authentic deeds, is the strength of the proof is complete, which means that the evidence which can generate sufficient certainty to grant legal consequences demanded by the plaintiff, without prejudice to the possibility of evidence about the opposite , 3. The division of joint property in the form of land according to the author indeed be quite complicated if only a court decision which states that the joint

property is divided into two parts of equal magnitude, in this case the problem of determining the area of land that will be part of each party. Kondis ini according to the author can be solved as follows, namely: a. Based on the court decision the parties filed with the local Land Office to split parcels of land which was originally a one (1) of the field into two (2) parcels of the same magnitude, to be issued a new certificate on the areas of the property; b. Sell plots of land with the consent of both parties and the proceeds divided to parts of the same magnitude. c. If the two sides do not reach an agreement, it is proposed to auction sales KP2LN Office (State Receivables and Auction with the permission of the Court.

Keywords: Notary Deed, treasure together, a result of divorce